

**PENGARUH KELEMBAGAAN DESA, TRANSPARANSI
DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA
JATI KESUMA KECAMATAN NAMORAMBE
KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

OLEH :

**M. FIKRI ASSIDDIQ
NPM: 188330035**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)5/12/22

**PENGARUH KELEMBAGAAN DESA, TRANSPARANSI
DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA
JATI KESUMA KECAMATAN NAMORAMBE
KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

OLEH :

**M. FIKRI ASSIDDIQ
NPM: 188330035**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)5/12/22

**PENGARUH KELEMBAGAAN DESA, TRANSPARANSI
DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA
JATI KESUMA KECAMATAN NAMORAMBE
KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Medan Area



OLEH:

**M. FIKRI ASSIDDIQ
NPM : 188330035**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 5/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)5/12/22

HALAMAN PENGESAHAN

Judul skripsi : Pengaruh Kelembagaan Desa, Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang

Nama : **M. FIKRI ASSIDDIQ**

Npm : 188330035

Program Studi : Akuntansi

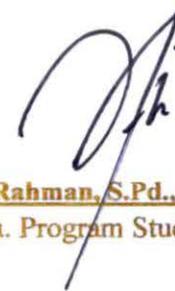
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh:
Komisi Pembimbing


(Sari Nuzullina Rahmadhani, SE, M.Acc, Ak)
Pembimbing

Mengetahui:


(Ahmad Rafiqi, BBA (Hons), MMgt., Ph.D., CIMA)
Dekan


(Fauziah Rahman, S.Pd., M.Ak)
Ka. Program Studi

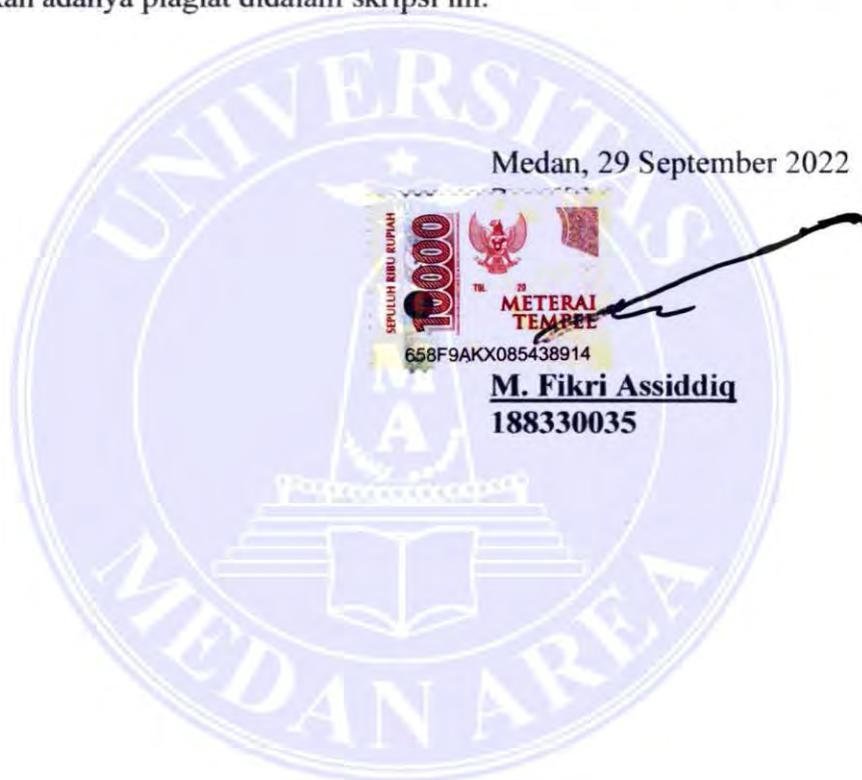
Tanggal/Bulan/Tahun Lulus: 29/September /2022

HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat didalam skripsi ini.

Medan, 29 September 2022



M. Fikri Assiddiq
188330035

HALAMAN PERNYATAAN PERSEJUTUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. FIKRI ASSIDDIQ

Npm : 188330035

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Pengaruh Kelembagaan Desa, Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 29 September 2022

Yang Menyatakan

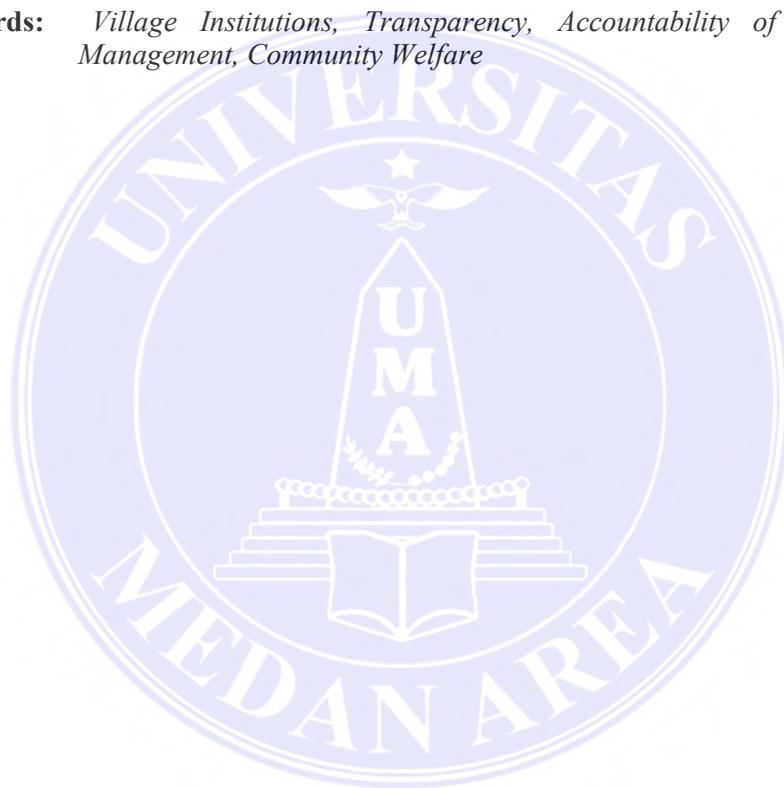


M. Fikri Assiddiq
188330035

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of village institutions, transparency and accountability of village fund management on the welfare of the community in Jati Kesuma Village, Namorambe District, Deli Serdang Regency. This type of research is quantitative associative. The sample in this study was 90 people who had the criteria for a minimum age of 18 years and the last education was high school or equivalent. Sources of data used in this study is primary data. Data collection techniques using questionnaire data. The data analysis technique used in this study is multiple linear regression analysis with the IBM SPSS version 25 technique. The results show that village institutional variables, transparency and accountability of village fund management have a significant positive effect partially and simultaneously on community welfare in Jati Kesuma Village, Namorambe Regency. Deli Serdang.

Keywords: *Village Institutions, Transparency, Accountability of Village Fund Management, Community Welfare*



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kelembagaan desa, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif asosiatif. Sampel dalam penelitian ini adalah 90 orang masyarakat yang memiliki kriteria usia minimal 18 tahun dan pendidikan terakhir SMA sederajat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan data kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi linier berganda dengan teknik IBM SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kelembagaan desa, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh positif signifikan secara parsial dan simultan terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang.

Kata kunci: Kelembagaan Desa, Transparansi, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Kesejahteraan Masyarakat



RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama M. Fikri Assiddiq dilahirkan di Medan pada tanggal 21 Agustus 2000 dari Ayah Adi dan Ibu Fitri. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Pada tahun 2018 peneliti telah lulus dari SMA Angkasa Lanud Soewondo Medan dan pada tahun 2018 peneliti terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan area.



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh.

Alhamdulillahirabbil'Alamin, dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. *Shalawat* dan juga salam dipersembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* yang telah membawa kita dari zaman Jahiliyyah ke zaman Islamiyah seperti sekarang.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Medan Area. Sehubungan dengan itu, maka disusun Skripsi ini yang berjudul: **“Pengaruh Kelembagaan Desa, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang ”**. Dalam penyusunan Skripsi ini penulis berusaha menyajikan yang terbaik dengan segala kemampuan yang dimiliki. Namun penulis juga menyadari bahwa pengetahuan yang dimiliki masih terbatas, sehingga dalam penulisan Skripsi ini penulis banyak menerima masukan dan bantuan dari pihak-pihak tertentu.

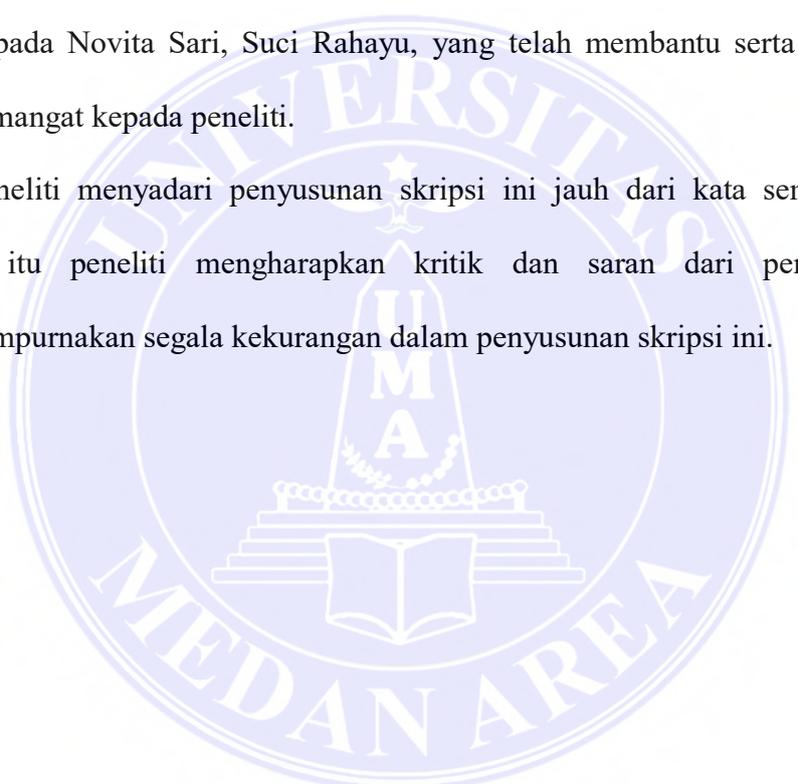
Peneliti menyadari jika selama proses penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan *do'a*, bimbingan, bantuan dan dukungannya. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc. selaku Rektor Universitas Medan Area.

2. Bapak Ahmad Rafiki BBA (Hons), MMgt, Ph.D,CIMA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
3. Ibu Fauziah Rahman, S.Pd, M.Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
4. Ibu Sari Nuzullina Rahmadhani, SE,M.Acc,Ak selaku Dosen Pembimbing yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan, bimbingan serta saran yang bermanfaat selama proses penulisan skripsi ini.
5. Ibu Rana Fathinah Ananda, SE, M.Si selaku Ketua Sidang yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan juga masukan yang bermanfaat dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Ibu Sucitra Dewi, SE, M.Si selaku Dosen Sekretaris yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan juga masukan yang bermanfaat dalam proses penulisan skripsi ini.
7. Bapak Drs. Ali Usman Siregar, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan juga masukan yang bermanfaat dalam proses penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu pengetahuan, arahan, bimbingan serta nasihatnya kepada penulis selama menuntut ilmu di Universitas Medan Area.
9. Seluruh Staff Akademik Universitas Medan Area yang sudah memberikan kemudahan dalam proses administrasi.
10. Instansi tempat meneliti yaitu Desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk melakukan penelitian dan beserta pihak-pihak yang terkait di dalamnya.

11. Teristimewa kepada kedua Orang Tua yang saya sayangi dan cintai Bapak Adi dan Ibu Fitri yang sudah memberikan dukungannya baik dari materi, do'a, dan juga nasihat dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Saudara-Saudari yang saya sayangi Abang saya M. Fikrul Fahmi Adik laki-laki saya M. Ghalib Sayuti dan Adik perempuan saya Yasmin Adawiyah yang sudah memberikan doa dan dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan kelas Akuntansi A1 Stambuk 2018 terkhususnya kepada Novita Sari, Suci Rahayu, yang telah membantu serta memberikan semangat kepada peneliti.

Peneliti menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu peneliti mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.



Medan, 29 September 2022

M.FIKRI ASSIDDIQ

NPM. 188330035

DAFTAR ISI

ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Teori Keagenan	9
2.1.2 Teori <i>Stewardship</i>	10
2.1.3 Kesejahteraan Masyarakat	11
2.1.4 Kelembagaan Desa	15
2.1.5 Transparansi.....	18
2.1.6 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	21
2.1.6.1 Dana Desa.....	25
2.2 Penelitian Terdahulu	26
2.3 Kerangka Konseptual.....	28
2.4 Hipotesis	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	35
3.1 Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian	35
3.1.1 Jenis Penelitian	35
3.1.2 Lokasi Penelitian.....	35
3.1.3 Waktu Penelitian.....	36
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	36
3.3 Populasi dan Sampel	37
3.3.1 Populasi.....	37
3.3.2 Sampel	37
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.5 Definisi Operasional Variabel.....	39
3.6 Skala Pengukuran Variabel.....	41
3.7 Teknik Analisis Data.....	41
3.7.1 Uji Statistik Deskriptif.....	42
3.7.2 Uji Kualitas Data	42
3.7.3 Uji Asumsi Klasik.....	43
3.7.4 Analisis Regresi Linear Berganda	44
3.7.5 Uji Hipotesis	45

BAB IV PEMBAHASAN.....	47
4.1 Hasil	47
4.1.1 Gambaran Umum Desa (Sejarah, Struktur Organisasi, dan Visi Misi.....	47
4.1.2 Deskripsi Hasil Penelitian.....	50
4.1.2.1 Deskripsi Responden.....	50
4.1.2.2 Uji Statistik.....	53
4.1.2.2.1 Uji Kualitas Data	53
4.1.2.2.2 Deskripsi Jawaban Responden	54
4.1.2.2.3 Uji Asumsi Klasik	56
4.1.2.2.4 Uji Statistik Deskriptif.....	59
4.1.2.2.5 Uji Analisis Regresi Linear Berganda	60
4.1.2.2.6 Uji Hipotesis	63
4.2 Pembahasan.....	64
4.2.1 Pengaruh Kelembagaan Desa Terhadap	68
Kesejahteraan Masyarakat.....	68
4.2.2 Pengaruh Transparansi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.....	70
4.2.3 Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat	71
4.2.4 Pengaruh Kelembagaan Desa, Transparansi dan AkuntabilitasPengelolaan Dana Desa secara Simultan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat	73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	75
5.1 Kesimpulan	75
5.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	26
Tabel 3.1 Waktu Pelaksanaan Penelitian	36
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel.....	39
Tabel 3.3 Bobot Penilaian Kuesioner.....	41
Tabel 4.1 Jenis Kelamin Responden	51
Tabel 4.2 Pendidikan Terakhir.....	51
Tabel 4.3 Usia Responden.....	52
Tabel 4.4 Tanggapan Responden Variabel Y	53
Tabel 4.5 Tanggapan Responden Variabel X1	54
Tabel 4.6 Tanggapan Responden Variabel X2	55
Tabel 4.7 Tanggapan Responden Variabel X3	55
Tabel 4.8 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	55
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas.....	56
Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas.....	56
Tabel 4.11 Hasil Uji Normalitas <i>Kolmogorov Smirnov Test</i>	59
Tabel 4.12 Hasil Uji Multikolinearitas.....	61
Tabel 4.13 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda.....	63
Tabel 4.14 Hasil Uji Parsial (Uji t)	65
Tabel 4.15 Hasil Uji Simultan (Uji F).....	67
Tabel 4.16 Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R ²).....	67

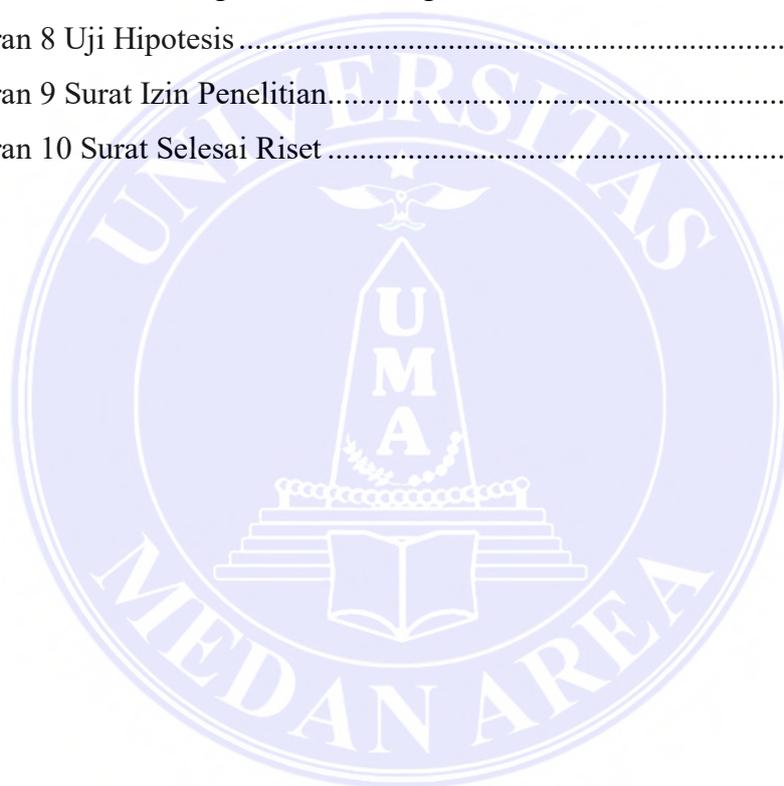
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	29
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Jati Kesuma	49
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas Berdasarkan Grafik Histogram	57
Gambar 4.3 Hasil Uji Normalitas Berdasarkan P-P Plot Regresi	58
Gambar 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas Menggunakan <i>Scatter Plot</i>	60



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	82
Lampiran 2 Dokumentasi.....	85
Lampiran 3 Jawaban Responden.....	88
Lampiran 4 Uji Statistik Deskriptif.....	90
Lampiran 5 Uji Kualitas Data	91
Lampiran 6 Uji Asumsi Klasik	96
Lampiran 7 Analisis Regresi Linear Berganda	97
Lampiran 8 Uji Hipotesis	97
Lampiran 9 Surat Izin Penelitian.....	99
Lampiran 10 Surat Selesai Riset	100



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Harapan utama pemerintah Indonesia pada saat ini begitu juga harapan dari seluruh masyarakat Indonesia, yaitu untuk mensejahterakan masyarakatnya dan menjadi masyarakat yang sejahtera. Pemerintah terus berusaha agar peningkatan perekonomian masyarakat Indonesia tercapai melalui pembangunan, baik di kota maupun pedesaan. Walaupun demikian, pemerintah masih sering mendapatkan kesulitan dan juga masalah dalam mewujudkan harapan tersebut (Siregar, 2021). Pemerintah masih sering menemukan masalah-masalah seperti ketidakseimbangan di dalam negara yang disebabkan oleh belum meratanya keuangan masyarakat Indonesia sehingga pemerintah menaruh perhatian khusus untuk melakukan perubahan pada pedesaan. Ketidakseimbangan tersebut disebabkan oleh kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang tidak merata. Namun pemerintah mempunyai strategi untuk mengatasi masalah ini yaitu dengan memberikan perhatian yang besar terhadap pembangunan desa. Pembangunan yang tidak merata di setiap daerah akan berdampak pada tingginya angka kemiskinan yang ada di Indonesia (Yupita dan juita, 2020). Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia berjumlah 9,78% pada tahun 2020. Dari jumlah yang tertera, termasuk dari persentase jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan sebesar 7,38% dan persentase jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan sebesar 12,82% (bps.go.id).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa Pasal 1 Ayat 1 menyatakan, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan sistem pemerintahan terkecil yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, Dalam pemerintahannya desa mempunyai harapan terciptanya pondasi yang kuat sebagai usaha dalam membantu pembangunan desa yang lebih baik dan merata sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat desa yang pada akhirnya terbebas dari kemiskinan (Siregar, 2021). Menurut Nafidah dan Suryaningtyas (2015) desa dibentuk sebagai wadah untuk menyediakan dan menyelenggarakan dalam segala hal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa dana desa mulai dikeluarkan pada tahun 2015 sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 menyebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dipakai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang desa, dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan untuk desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Dengan adanya suntikan dana dari pemerintah pusat terhadap pemerintah desa diharapkan menjadi kekuatan dalam menjalankan perwujudan

pembangunan dan pemberdayaan desa, agar pencapaian desa yang kuat, maju, mandiri dan sejahtera (Winardi, 2019).

Jumlah dana desa yang cukup besar membutuhkan suatu lembaga desa dengan sumber daya manusia yang kuat, baik aparatur pemerintahan desa, masyarakat yang terlibat dan tenaga pendamping desa. Akan tetapi fakta yang didapatkan belum sesuai dengan harapan. Kasus-kasus penyalahgunaan dana desa masih sering terjadi. Bersumber data dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) bahwa terdapat 169 kasus korupsi di Indonesia pada kurun waktu semester satu tahun 2020. Dari 169 kasus tersebut, kasus penyalagunaan dana desa merupakan kasus yang tertinggi yaitu sebanyak 44 kasus. Kasus yang tercatat tadi menimbulkan efek yang tidak baik dimana Negara mengalami kerugian sebesar Rp 32,3 miliar (Databoks.katadata.co.id, 2020).

Kelembagaan desa merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan desa tidak dapat dilakukan tanpa adanya kelembagaan desa dan partisipasi masyarakat (Nasrul, 2013). Desa yang maju dapat diketahui dari tingkat perekonomian masyarakatnya, dengan perekonomian masyarakat desa yang baik ditambah adanya pembangunan infrastruktur yang merata maka cenderung tingkat ekonomi masyarakat akan meningkat, dengan demikian masyarakat lebih sejahtera (Yupita dan Juita, 2020). Kelembagaan desa berperan sebagai tempat partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan transparan serta mewujudkan akses masyarakat agar lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan (Indriati, 2019).

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah untuk memberikan informasi yang perlu diketahui kepada masyarakat mengenai hal-hal saat melaksanakan tugasnya (Kuswanti, 2020). Transparansi mempunyai makna untuk setiap masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam mengetahui proses anggaran yang menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat terutama mengenai hal pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan dana desa (Putra dan Rasmini, 2019).

Akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggungjawaban dana atas pengelolaan dana desa. Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang berwenang dan berhak mendapatkan informasi dari apa yang sudah dikerjakan untuk memastikan nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas dan reliabilitas. Pelaksanaan akuntabilitas dana desa, memberikan informasi kepada pemerintah pusat dimana program dana desa telah terselenggarakan dengan baik, selain itu masyarakat di berikan media untuk mengetahui apa saja yang sudah kerjakan oleh pemerintah desa atas dana yang diterima dari pemerintah pusat. Untuk meyakinkan bahwa program dana desa sudah di salurkan oleh pemerintah desa, maka sudah seharusnya pemerintah dan masyarakat terlibat dalam pemantauan proses pelaksanaannya dengan tujuan apakah dana desa sudah dikelola sesuai dengan harapan pemerintah pusat dan masyarakat. Keterlibatan pemerintah dan masyarakat diawali dari penyusunan anggaran program apa yang akan dilaksanakan sampai pelaporan pertanggung jawaban hasilnya (Siregar, 2021).

Salah satu desa di Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Namorambe yaitu Desa Jati Kesuma merupakan desa yang sedang berkembang dimana mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan peternak. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Ibu Sekertaris Desa Jati Kesuma bahwasannya sudah dibentuk lima kelembagan desa di Jati Kesuma yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Gabungan kelompok tani (Gapoktan) dan Kelompok Tani. Dimana lembaga ini sudah berperan aktif namun dalam Gabungan Kelompok Tani, Kelompok Tani dan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga belum beroperasi sesuai harapan dikarenakan program-program mereka yang belum mendapatkan hasil maksimal, ditambah lagi belum terbentuk nya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi penyebab masih ada nya kekurangan dalam kelembagaan desa Jati Kesuma [Maryati SH, Hasil Wawancara 21 Februari 2022). Permendagri Nomor 20 tahun 2018 menyatakan keuangan desa dikelola berdasarkan transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (kumbang.desa.id). Prinsip transparan merupakan prinsip pengungkapan diri kepada masyarakat bahwa masyarakat bebas mendapatkan keterangan yang sesungguhnya diberikan keistimewaan, kesukarelaan dari kepengurusan perangkat desa berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan (Amalia, Diana dan Mawardi, 2022). Seperti yang dilakukan oleh pemerintah desa Jati Kesuma dengan melakukan rapat bersama masyarakat desa membagikan *print out* mengenai pengelolaan dana desa serta memasang infografis pengumuman anggaran dan realisasi anggaran di Balai Desa. Hal ini dilakukan agar transparansi pengelolaan dana desa

terlaksanakan dengan terbuka dan memberikan informasi yang benar sesuai perundang-undangan (PP Pasal 25 Nomor 71 Tahun 2010). Informasi yang diberikan Ibu bendahara desa jati kesuma salah satu upaya dari pemerintah desa Jati Kesuma dalam melaksanakan akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan Memberikan laporan pertanggungjawaban pada awal semester sampai akhir semester dalam bentuk manual dan dalam aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) selain itu hasil laporan tersebut dipasang di Balai Desa dalam bentuk infografis [Dinni Ammaliyah, S.Sos, Hasil Wawancara, 8 Maret 2022]. Hal ini dilakukan agar akuntabilitas pengelolaan dana desa berjalan dengan baik dan benar sesuai Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999.

Berdasarkan Fenomena diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul, **“Pengaruh Kelembagaan desa , Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kelembagaan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang?
3. Apakah akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang?

4. Apakah kelembagaan desa, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa secara simultan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian, maka dapat di pastikan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang.
3. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang.
4. Untuk mengetahui pengaruh kelembagaan desa, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa secara simultan terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membarikan manfaat kepada beberapa bagian, yaitu:

1. Bagi peneliti, Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman dari kelembagaan, transparansi, akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang.

2. Bagi pemerintah desa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan memberikan arah yang baik untuk mempertahankan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat terkhusus dalam hal Implementasi kelembagaan desa, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang.
3. Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman juga wawasan akan kesejahteraan masyarakat, selain itu dapat dijadikan sebagai bahan ataupun referensi dalam melakukan penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori keagenan (*Agency theory*) Teori keagenan atau *agency theory* adalah teori yang menyatakan kesepakatan satu orang atau lebih yaitu hubungan antara *principal* dan *agent*. Dalam dunia pemerintahan yang demokratis, hubungan antara pemerintah dan masyarakat dapat digambarkan seperti hubungan keagenan. Dimana pemerintah diberikan wewenang dan kuasa untuk melakukan kewajiban khusus yang sudah dipercayakan masyarakat. Pemerintah wajib mempertanggung jawabkan apa saja yang akan dilakukan untuk kepentingan masyarakat dalam bentuk laporan masyarakat juga berhak mengetahui isi laporan tersebut dan berhak memberikan penilaian terhadap laporan tersebut. Organisasi sektor publik mempunyai tujuan dimana masyarakat dapat merasakan pelayanan yang baik agar kebutuhan yang diperlukan masyarakat dapat terpenuhi secara adil dan merata. Maka dari itu untuk mewujudkan tujuan tersebut pemerintah harus bersikap dengan adil, tidak egois dan tidak melakukan suatu hal yang hanya menguntungkan dirinya sendiri atau sebelah pihak sehingga hasil yang didapat memberikan manfaat kepada orang banyak (Kuswanti, 2020). Menurut Sengaji (2018) teori keagenan menjelaskan bahwa pemerintah tidak dapat mengalokasikan dan mengelola sumber daya secara sendirian, sehingga pemerintah memberikan wewenang untuk mengelola sumber daya kepada pihak lain.

2.1.2 Teori *Stewardship*

Pada penelitian ini peneliti juga menggunakan teori *Stewardship*. Teori *stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidak terpengaruh pada tujuan-tujuan individu namun lebih fokus pada sasaran utama dalam kepentingan organisasi (Donaldson dan Davis, 1991). Menurut jannah (2016) teori *stewardship* merupakan suatu keadaan dimana manajer sebagai *steward* lebih fokus untuk mewujudkan keinginan bersama dan tujuan organisasi tidak pada keinginan sendiri. Teori tersebut berspekulasi bahwa antara kesuksesan dan kepuasan organisasi memiliki kaitan yang kuat.

Teori *stewardship* dapat digunakan pada penelitian akuntansi sektor publik seperti organisasi pada pemerintahan (Dewi, 2020). Yang mana mulai dari perkembangannya, akuntansi sektor publik telah direncanakan untuk mencukupi informasi dalam hubungan antara *steward* dan *principals*. Dimana pemerintah desa berperan sebagai *steward*, sedangkan masyarakat berperan sebagai *principal* yang memiliki dana. Hubungan teori *stewardship* dengan sektor publik yaitu pemerintah desa dinilai dapat bertanggungjawab dan dapat dipercaya dalam pekerjaannya untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap publik. Pemerintah desa lebih sering berperan sebagai *steward* karena dituntut oleh jenis layanan yang diberikan, jenis insentif dan sanksi yang digunakan, tingkat kapasitas manajemen publik dan frekuensi informasi yang digunakan (Slyke, 2007). Dengan demikian diharapkan teori dapat menjelaskan bahwasanya pemerintahan desa sebagai *steward* yang bekerja dan melaksanakan tugas untuk kepentingan masyarakat desa saja (Siregar, 2021). Dengan demikian segala keputusan dalam perencanaan bertujuan untuk fokus terhadap pelayanan untuk kepentingan masyarakat dan

pemerintah selalu berupaya agar masyarakat tidak kecewa sebagai *principals* dalam mencapai tujuan organisasi (Siregar, 2021)

Teori *stewardship* jika dihubungkan dengan kesejahteraan masyarakat diharapkan pemerintah desa dapat mengelola dana desa melalui keputusan yang diambil dari dua belah pihak yang digabungkan antara pemerintah desa dan masyarakat untuk tujuan organisasi pemerintahan sehingga keinginan bersama dapat tercapai. Hal itu juga mendukung rasa kepercayaan masyarakat yang meningkat dan terciptanya masyarakat yang sejahtera.

2.1.3 Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan adalah usaha seseorang maupun organisasi agar dapat memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani dari seseorang maupun orang dalam organisasi tersebut dengan upaya meningkatkan produktivitas dirinya, baik dalam hubungan pekerjaan ataupun diluar pekerjaan yang secara langsung maupun tidak langsung dan memperoleh rasa aman, keselamatan, kesehatan dan kemakmuran bagi orang-orang tersebut (Siregar, 2021). Sedangkan masyarakat adalah individu-individu ataupun sekelompok orang yang mempunyai tujuan tertentu dan sama, saling berhubungan secara terus-menerus dan pada akhirnya membentuk relasi sosial yang teratur, sehingga saling membutuhkan antara satu sama lain baik individu atau kelompok (Siregar, 2021).

Kesejahteraan masyarakat adalah keadaan dimana kebutuhan akan keuangan, sosial dan agama sebagai bentuk dari kehidupan layak sehingga mampu untuk mengembangkan diri dapat terpenuhi dengan baik, sehingga sebagai seorang manusia dapat melaksanakan kegiatan sosialnya di lingkungan masyarakat dengan baik. Pemerintah desa mempunyai tugas wajib untuk mewujudkan kesejahteraan

bagi masyarakat desa sehingga masalah ekonomi, sosial dan spiritual yang menjadi masalah di kehidupan masyarakat selama ini dapat terselesaikan (Prandara, 2020). Kesejahteraan masyarakat adalah aturan yang terkonsep dan tertata dengan baik dalam kehidupan sosial, material dan spiritual yang didalamnya terkandung rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin yang dapat meningkatkan aktivitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial baik dirinya, keluarga maupun masyarakat secara umum (Dura, 2016). Kesejahteraan sosial menurut UU No. 11 Thn 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal (1) ayat 1: “kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, sepirtual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

Kesejahteraan masyarakat untuk level menengah ke bawah merupakan gambaran tentang tingkat kehidupan masyarakat pada umumnya. Tingkat hidup masyarakat akan meningkat dan menjadi lebih baik, jika masalah kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan produktivitas masyarakat juga meningkat. Oleh sebab itu, ukuran kesejahteraan masyarakat dilihat dari terselesaikannya masalah pokok masyarakat tersebut (Siregar, 2021).

Kesejahteraan masyarakat dapat terpengaruh oleh beberapa faktor yang membentuk kesejahteraan. Faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat tersebut menurut Mayasari (2019) antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Kondisi rumah yang ditempati oleh masyarakat.
2. Rumah memiliki aliran listrik dan tersedia fasilitas air bersih, baik sumur maupun dari perusahaan PDAM.

3. Disekitar tempat tinggal terdapat infrastruktur bagi masyarakat umum.
4. Pendapatan masyarakat berada diatas pendapatan perkapita wilayah tempat tinggalnya.
5. Kepatuhan dan penghargaan masyarakat atas adat istiadat di dalam masyarakat.
6. Kondisi iklim alam daerah sekitar masyarakat.
7. Masyarakat memiliki kebebasan berbuat dan memberikan pendapatnya kepada pemerintah dan masyarakat lainnya.

Badan pusat Statistik (BPS) menyatakan ada empat belas kriteria menentukan suatu keluarga dinyatakan tidak mampu atau belum sejahtera, kriteria tersebut adalah luas rumah kurang dari $8m^2$ per orang, jenis lantai terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan, dinding rumah terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester, tidak memiliki fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK), tidak memiliki kapasitas penerangan listrik, tidak memiliki air bersih dirumah, jenis energi untuk memasak masih menggunakan arang/kayu bakar/minyak tanah, jumlah mengkonsumsi daging, susu dan ayam, jumlah membeli pakaian dalam kurun waktu satu tahun, jumlah makan setiap hari, kemampuan keluarga untuk berobat, jika petani, maka berapa luas lahan usaha pertaniannya, tingkat pendidikan kepala keluarga, serta simpanan atau memiliki barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp.500,000.-. Contoh barang yang mudah dijual seperti sepeda motor, emas, ternak, kapal, dan barang model lainnya yang mudah di pindah tangan. Jika dari 14 kriteria tadi ada minimal 9 kriteria terpenuhi maka suatu rumah tangga tersebut dinyatakan miskin tidak sejahtera.

Indikator kesejahteraan menurut Wulandari (2019) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tingkat Pendapatan

Pendapatan adalah sebuah penghasilan yang didapatkan dari hasil bekerja ataupun usaha baik gaji individu ataupun gaji kelompok. Gaji yang diperoleh tadi digunakan untuk mendapatkan kesejahteraan, pengajaran, dan kebutuhan materi lainnya.

2. Pendidikan

Pendidikan merupakan bimbingan atau bantuan yang diberikan orang tua kepada anak-anak untuk mendapatkan pengetahuan sehingga mampu melakukan segala tugas atau hal tanpa bantuan orang lain. Pendidikan merupakan tempat untuk mendapatkan dan memperoleh kapasitas untuk sosialisasi, kontrol sosial, pelestarian budaya, reproduksi budaya, difusi kultural, peningkatan sosial, dan fungsi modifikasi sosial.

3. Kesehatan

Gagasan dan makna kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu:

- a. Keluhan kesehatan
- b. Proses kelahiran
- c. Kelahiran
- d. Penolong persalinan oleh tenaga kesehatan
- e. Vaksinasi
- f. Air Susu Ibu
- g. Menyembuhkan diri sendiri

- h. Obat tradisional
 - i. Rawat jalan
 - j. Dikecualikan dari perawatan rawat jalan
 - k. Rawat inap
4. Perumahan

Dalam data statistik tentang penginapan yang diingat untuk penggunaan keluarga, berikutnya adalah ide dan makna penginapan seperti yang ditunjukkan oleh BPS:

- a. Bangunan Fisik
- b. Status Penguasaan Rumah

Dari penjelasan diatas maka pembangunan moneter yang berkualitas adalah pembangunan yang menjunjung tinggi *human of event*. Petunjuk yang terus diciptakan dituntut untuk mendapatkan pilihan dan memberikan efek positif antara perkembangan moneter dan perputaran manusia.

Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencapai kesejahteraan keluarga yaitu sebagai berikut (Emylia dan Mildawati, 2019):

- 1. Bangunan batas wilayah dan kelembagaan lokal
- 2. Mengerjakan kualitas dan jumlah yayasan dan kantor sosial dan keuangan yang penting untuk wilayah setempat
- 3. Kerangka kerja kemajuan partisipatif kelembagaan
- 4. Kapasitas produktif dan pekerjaan pemerintah terdekat

2.1.4 Kelembangan Desa

Lembaga atau *institution* merupakan suatu wadah untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan begitu, adanya

lembaga desa merupakan solusi untuk melaksanakan amanah yang diterima dan menjadi salah satu elemen dari pemerintahan desa tersebut dan untuk membantu melaksanakan tujuan organisasi desa (Siregar, 2021).

Mengadopsi dari UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kedudukan lembaga desa, tugas dan fungsi lembaga desa dinyatakan sebagai indikator, dan berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa ada enam lembaga di desa, yaitu sebagai berikut:

1. Badan Permusyawaratan Desa

Pemerintah Desa berkedudukan sebagai komponen organisasi desa, bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa, melakukan identifikasi permasalahan pemerintah desa. Situasi pemerintah desa menempatkan pemerintah desa sebagai koordinator dasar dari upaya pemerintah desa untuk menawarkan jenis bantuan kepada daerah, penguatan daerah, dan kemajuan daerah desa.

2. Lembaga Kemasyarakatan

Badan permusyawaratan Desa (BPD) merupakan suatu institusi desa yang menjalankan fungsi pemerintahan desa, dimana anggotanya adalah orang-orang yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat desa sebagai representasi perwakilan masyarakat desa di dalam pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. Secara bersama-sama dengan kepala sekolah menyusun, membahas dan bersepakat untuk menetapkan dan menjalankan Rancangan Peraturan Desa.
- b. Menyerap, mengakomodir dan menyampaikan pendapat masyarakat desa kedalam rapat-rapat desa.
- c. Menjalankan peran untuk mengawasi kinerja Kepala Desa.

3. Lembaga Adat

Lembaga Adat adalah lembaga desa yang menjalankan fungsi adat istiadat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam susunan perangkat desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa. Lembaga adat mempunyai tugas memberikan bantuan pemerintahan desa dan sebagai mitra untuk memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa.

4. Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga kemasyarakatan desa merupakan tempat bagi masyarakat untuk berpartisipasi sebagai mitra yang bekerjasama dengan Pemerintah Desa membangun desanya masing-masing.

5. Kerja sama antar desa

Kerjasama antar satu desa dengan desa lainnya terdiri dari:

- a. Bekerjasama untuk mengembangkan bisnis yang dimiliki desa masing-masing agar dapat meraih nilai ekonomis yang pada akhirnya mampu bersaing dengan usaha sejenis lainnya.
- b. Menjalankan program kemasyarakatan seperti memberikan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan pembangunan desa yang telah terprogram, serta memaksimalkan pemberdayaan masyarakat antara satu desa dengan desa lainnya.
- c. Bidang keamanan dan ketertiban.

6. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Operasional BUMDes dijalankan dengan mengedepankan sikap kekeluargaan dan gotong royong pada bidang ekonomi dan pelayanan umum. Keuntungan yang diperoleh BUMDes dimanfaatkan untuk:

- a. Alokasi mengembangkan bisnis.
- b. Tambahan alokasi pembangunan desa, melakukan pemberdayaan masyarakat desa, memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu melalui program hibah, bansos dan program kegiatan dan bergilir.

Dalam melaksanakan pengembangan dan pembangunan desa, maka pemerintah desa wajib memaksimalkan fungsi lembaga yang ada tersebut dalam upaya memaksimalkan aktivitas operasional pemerintah desa, menjalankan pembangunan fisik desa, pembinaan kepada kelompok kemasyarakatan, dan memberdayakan masyarakat desa (Siregar 2021).

Setiap lembaga desa tersebut mempunyai kedudukan, kewajiban dan kapasitas tertentu dalam pembangunan pemerintah desa, yakni:

1. Situasi lembaga desa mencerminkan pekerjaan yang akan diterima oleh lembaga desa tersebut.
2. Kewajiban dan usur setiap lembaga desa merupakan suatu ketetapan atau gambaran lebih lanjut dari kekuasaan desa, dengan tujuan agar semua pengurus desa dapat dilaksanakan dengan baik oleh lembaga desa tersebut.

2.1.5 Transparansi

Transparansi berasal dari kata *transparency* yang maknanya prinsip untuk membuka diri kepada masyarakat untuk memberikan hak mereka mendapatkan akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai

penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara (Ardiyanti, 2019). Menurut Hadi (2019) transparansi adalah dasar untuk pengelolaan dana desa yang harus dilakukan di dalam semua proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa. Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang membagikan informasi keuangan dengan benar dan terbuka kepada masyarakat dengan penilaian bahwa masyarakat mempunyai kebebasan untuk memahami secara terbuka dan menyeluruh atas pengelolaan sumber daya yang sudah diamankan.

Transparansi harus siap mempertanggungjawabkan setiap aktivitas yang dilakukan, menerima kritik juga saran dan pada tahap pertanggungjawaban. Hal itu dapat dilaksanakan dengan menggunakan karakteristik transparansi (Ardiyanti, 2019), sebagai berikut:

a. *Informativeness* (informatif)

Alur penyerahan informasi, berita, data, fakta serta penjelasan proses kepada relasi atau rekan harus jelas dan valid.

b. *Openess* (Keterbukaan)

Keterbukaan mengenai informasi dan data adalah hak bagi relasi atau rekan yang harus diberikan, sehingga relasi atau rekan dapat mengakses dan memantau segala informasi dan data yang telah diungkapkan.

c. *Disclosure* (Pengungkapan)

Pengungkapan yang dimaksud adalah pengungkapan atas kegiatan dan kinerja keuangan kepada relasi atau rekan. Pengungkapan dibagi menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan wajib

adalah pengungkapan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab perusahaan yang diwajibkan oleh standar akuntansi maupun yang tertera dalam standar operasional prosedur dan peraturan badan pengawas. Sedangkan pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dibuat dengan sengaja melewati apa yang dibutuhkan oleh organisasi, norma pembukuan, dan pedoman administrasi kantor.

Transparansi merupakan dasar keterbukaan yang memungkinkan masyarakat luas untuk dapat mengetahui dan mengakses data secara luas dan efektif mengenai informasi keuangan. Dengan demikian, adanya keterbukaan akan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk mendapatkan semua informasi mengenai organisasi, dewan keuangan dan administrasi, mulai dari tujuan hingga hasil yang telah dicapai (Ardiyanti, 2019). Artinya dalam pelaksanaan transparansi ini aparatur pemerintahan desa berwenang dalam memberikan pengawasan atas dana desa, karena dana desa merupakan milik orang – orang dimana desa tersebut berada, artinya bahwa dana desa harus diketahui dan dinikmati oleh seluruh daerah. Oleh karena itu, pemerintah desa dan prangkatnya wajib menyampaikan seluruh data penggunaan dana tersebut kepada masyarakat dan atasan secara transparan. Sehingga dengan pelaksanaan transparansi ini akan membangun kepercayaan dan mendapat penghargaan dari masyarakat dan atasan terhadap pemerintah desa (Siregar, 2021). Menurut Ardiyanti (2019), indikator yang dapat digunakan untuk mengukur transparansi adalah kesediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses dan kerangka regulasi yang menjamin transparansi. Oleh sebab itu, indikator transparansi adalah sebagai berikut:

1. Musyawarah yang mengikutsertakan masyarakat.

2. Akses informasi yang mudah serta transparansi yang jelas tentang perencanaan program.
3. Adanya akses informasi yang mudah serta transparansi yang jelas tentang pelaksanaan program.
4. Adanya akses informasi yang mudah serta transparansi yang jelas tentang pertanggungjawaban penggunaan dana desa.

2.1.6 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan kepada pihak yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Kuswanti, 2020). Menurut Ardiyanti (2019) Pertanggungjawaban tersebut sebagai bentuk untuk menjawab atau memperjelas pemaparan seorang printis, perintis kantor atau perkumpulan kepada orang-orang yang berhak. Nafidah dan Suryaningtyas (2015) menambahkan bahwa akuntabilitas menjadi komitmen pemerintah provinsi untuk mewakili penyelenggaraan dan pelaksanaan pemerintahan daerah dalam kaitanya dengan kemerdekaan wilayah untuk menggapai maksud dan tujuan yang disepakati bersama dengan cara mempertanggungjawabkan semua kegiatan dengan cara yang terukur, baik kualiatas kegiatannya maupun kuantitasnya.

Penelitian Emylia dan Mildawati (2019) menyatakan akuntabilitas memiliki perspektif yang terdiri dari berikut ini:

1. Tanggung jawab hubungan (*Accountability is a relationship*).
2. Tanggung jawab yang terletak pada hasil (*Accountability result oriented*).
3. Tanggung jawab membutuhkan laporan (*Accountability requires reporting*).

4. Tanggung jawab membutuhkan hasil (*Accountability is meaningless without consequences*).
5. Tanggung jawab lebih lanjut mengembangkan eksekusi (*Accountability improves performance*).

Mardiasmo (2002:165) mengatakan ada tiga aturan utama yang mendasari administrasi keuangan lokal, khususnya:

1. Prinsip transparansi (keterbukaan), keterbukaan disini mengandung arti bahwa individu daerah memiliki hak mendapatkan akses yang tidak dibedakan untuk mewujudkan siklus pengeluaran sebab mencakup keninginan daerah, khususnya dalam memenuhi kepentingan hidup orang banyak.
2. Prinsip akuntabilitas, akuntabilitas adalah standar tanggung jawab publik, yang mengandung makna bahwa siklus perencanaan mulai dari penyusunan, kesiapan dan pelaksanaan harus benar-benar dipertanggungjawabkan dan diwakilkan kepada DPRD dan daerah. Kelompok masyarakat tidak berhak untuk mengetahui rencana pengeluaran tetapi juga memiliki pilihan untuk meminta tanggung jawab atas pengaturan atau pelaksanaan rencana keuangan.
3. Tiga prinsip *value for money*, prinsip ini memberitahu manfaat dari tiga perhatian utama dalam interaksi perencanaan, khususnya terjangkau, layak, dan efektif. Terjangkau, lebih tepatnya pilihan dan pemanfaatan asset dalam jumlah dan karakteristik tertentu dengan biaya rendah. Efektif adalah pemanfaatan keuangan publik yang dapat memberikan sesuatu yang paling ekstrim dan memiliki kemudahan. Layak memberitahu bahwa pemanfaatan rencana pengeluaran harus mencapai target atau tujuan untuk membantu daerah setempat.

Penelitian Prandara (2020) menjelaskan aspek akuntabilitas dibedakan menjadi lima bagian, yaitu:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (Accountability for probity and legality)

Akuntabilitas hukum yaitu kesesuaian dengan undang-undang dan pedoman lain yang merupakan persyaratan dalam asosiasi. Akuntabilitas kejujuran adalah ketakutan terhadap perlakuan buruk terhadap jabatan, penghinaan dan intrik. Akuntabilitas hukum menjamin otoritas hukum dan ketertiban, sementara tanggung jawab yang asli menjamin praktik berkuasa yang solid.

2. Akuntabilitas Program

Program dalam organisasi harus menjadi program yang berkualitas dan menjadi teknik pendukung dalam mencapai tujuan dan visi, misi, organisasi. Badan publik diperlukan untuk mewakili program yang telah dibuat sampai pelaksanaan program.

3. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial atau akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk menjalankan administrasi berdaulat yang berhasil dan bijak.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Organisasi sektor publik harus mempunyai pilihan dalam mewakili strategi dengan mempertimbangkan efek yang akan dilihat nanti.

5. Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas finansial adalah bentuk tanggung jawab organisasi publik dalam pengelolaan aset publik (*public money*) secara finansial, memadai dan bijak, tidak ada kebocoran aset, pemborosan dan korupsi.

Isi dalam laporan keuangan harus memberikan data yang dapat digunakan oleh klien ringkasan fiskal untuk mensurvei tanggung jawab pemerintahan dalam membuat pilihan keuangan, sosial dan politik. Merujuk dari perspektif *akuntansi, American Accounting Associattion* menyatakan bahwa akuntabilitas unsur administrasi dapat dipisahkan menjadi empat kelompok, yaitu akuntabilitas terhadap:

1. Sumberdaya keuangan
2. Kepatuhan pada peraturan hukum yang berlaku dan kebijakan administratif
3. Efisiensi dan murahnya pengeluaran dana untuk suatu kegiatan
4. Hasil pelaksanaan kegiatan pemerintah tercermin pada pencapaian tujuan kegiatan, manfaat yang didapatkan dan tercapainya sasaran.

Melihat dari undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, indikator akuntabilitas pengelolaan dana desa yang wajib dipenuhi oleh kepala desa sebagai pengguna anggaran dana desa adalah sebagai berikut:

1. Adanya laporan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan kegiatan pemerintahan untuk setiap tahun yang diberikan kepada Bupati atau Walikota.
2. Adanya laporan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan kegiatan pemerintahan untuk akhir masa jabatan yang diberikan kepada Bupati atau Walikota.
3. Adanya laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemerintahan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk setiap akhir tahun anggaran dana desa.
4. Adanya informasi pelaksanaan pemerintahan yang diumumkan secara terbuka kepada masyarakat untk setiap akhir anggaran dana desa.

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini unruk mendapatkan gambaran akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian tata kelola dana desa untuk kurun waktu satu tahun anggaran dapat tercapai dengan baik
2. Pemerintah desa terlibat secara langsung dalam pengelolaan dana desa.
3. Adanya tim pelaksana yang melakukan pengawasan
4. Pengelola dana desa akan memberikan laporan pertanggungjawaban untuk setiap tahun anggaran.

2.6.1.1 Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 60 tahun 2014 tentang desa, maka dana desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan untuk desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.

Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Diadakannya dana desa yaitu sebagai bentuk pengakuan Negara atas kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa mengurus dan mengatur kegiatan pemerintahan, kepentingan masyarakat, dan hak tradisional atau hak asal usul, serta meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa (Ardiyanti, 2019).

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, tujuan disalurkannya dana desa yaitu sebagai bentuk komitmen Negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi maju, mandiri, dan

demokratis. Dengan adanya dana desa ini, maka desa dapat mewujudkan pembangunan desa yang bertujuan agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, menanggulangi kemiskinan, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat desa (djpb.kemenkeu.go.id).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bermaksud sebagai tolak ukur peneliti untuk membandingkan dan sebagai acuan penelitian saat ini. Ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki topik yang sama dengan penelitian ini yang digunakan sebagai rujukan yang sama dengan penelitian ini yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
Loura Emylia dan Titik Mildawati (2019)	Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Kebijakan Desa, Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat	Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Kebijakan Desa, Kelembagaan Desa berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat	Variabel Tambahan: Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Objek Penelitian: Desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe Tahun Penelitian: 2022
Rifa Rizka Hadi (2019)	Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus	Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa Dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat	Variabel Tambahan: Kelembagaan Desa, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Objek Penelitian: Desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe Tahun Penelitian: 2022

	Pada Desa Genengan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang)		
Rika Ardiyanti (2019)	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang	Variabel Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa	Variabel Tambahan: Kelembagaan Desa, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, dan Kesejahteraan Masyarakat Objek Penelitian: Desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe Tahun Penelitian: 2022
Afida Putri Eka Kuswanti (2020)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi ADD, Kebijakan Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat	Variabel Akuntabilitas, Transparansi ADD, Kebijakan Desa, Dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat	Variabel Tambahan: Kelembagaan Desa, dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Objek Penelitian: Desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe Tahun Penelitian: 2022
Lasmi Yupita dan Verni Juita (2020)	Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Nagari Sungai Tanang	Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa Dan Kelembagaan Desa berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat	Variabel Tambahan: Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Objek Penelitian: Desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe Tahun Penelitian: 2022

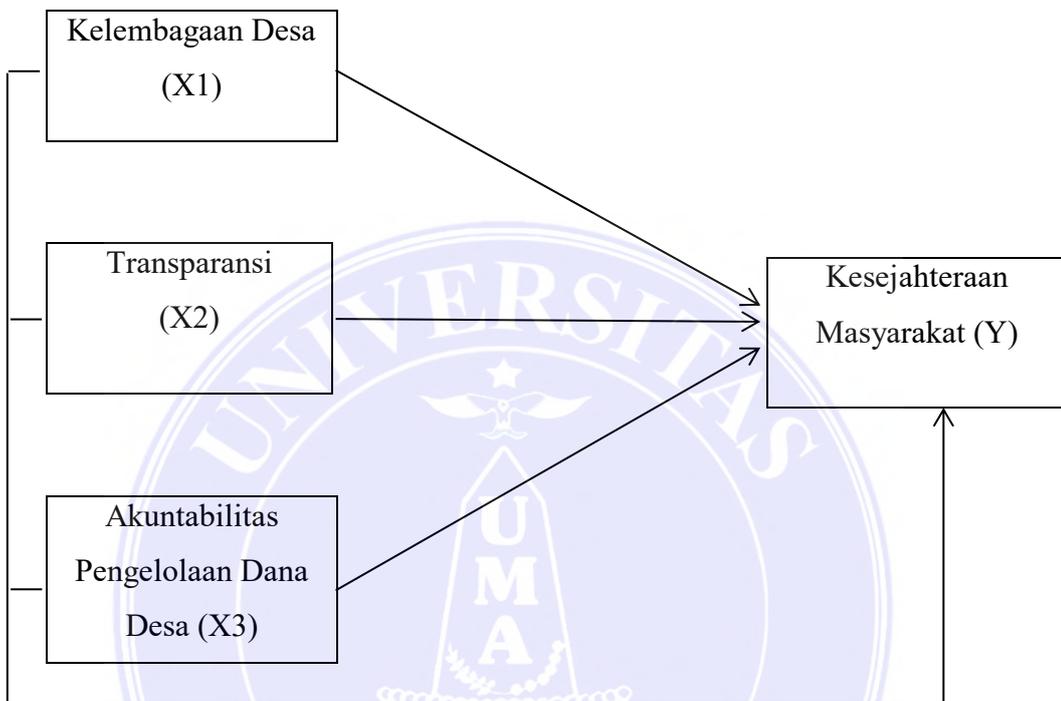
	Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam		
Muhammad Rizqi Anwar (2020)	Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Pati Kabupaten Pati)	Variabel Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat berpengaruh Positif dan Signifikan	Variabel Tambahan: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Transparansi Objek Penelitian: Desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe Tahun Penelitian: 2022
Dicky Arpillo Siregar (2021)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa, Kebijakan Desa Dan Kelembagaan Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai)	Variabel Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa dan Kebijakan Desa berpengaruh positif terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Sedangkan variabel Akuntabilitas dan Kelembagaan Desa tidak signifikan terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Variabel Tambahan: Transparansi, Akuntabilitas Pengelolaan Dana dan Kesejahteraan Masyarakat Objek Penelitian: Desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe Tahun Penelitian: 2022

Sumber: Data diolah Peneliti, 2022

2.3 Kerangka Konseptual

Menurut Sugiyono (2019:95) kerangka berpikir merupakan model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting. Kerangka konseptual perlu dikemukakan apabila dalam suatu penelitian terdapat dua atau lebih variabel.

Berdasarkan teori yang dipaparkan diatas maka kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah kelembagaan desa, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai variabel independen atau variabel bebas dan kesejahteraan masyarakat sebagai variabel dependen atau variabel terikat.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis Penelitian

a. Pengaruh Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengemukakan pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari masyarakat desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD mempunyai tugas dan fungsi untuk berkomitmen dengan kepala desa dalam menyusun peraturan penyelenggaraan pemerintah desa sehingga dapat meningkatkan dan memaksimalkan organisasi

pemerintahan desa, serta dapat menciptakan dan mengembangkan rasa kebersamaan.

Pengelolaan dana desa membutuhkan pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga dana tersebut dapat disalurkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dana desa diharapkan dapat menjadikan desa sebagai desa yang mandiri dan sejahtera, dengan demikian pelaksanaan dana desa harus dilakukan oleh perangkat desa bersama masyarakat.

Kaitan teori *agency* jika dikaitkan dengan variabel kelembagaan desa yaitu dimana kelembagaan desa berperan sebagai *agent* yang sudah diberikan kepercayaan oleh *principal* yaitu masyarakat untuk menjalankan suatu kuasa atau wewenang bagi kepentingan masyarakat. Kaitan teori *stewardship* jika dikaitkan dengan kelembagaan desa yaitu dimana pemerintah desa bekerja sebagai *steward* yang melaksanakan tugas dan fungsinya hanya fokus kepada kepentingan masyarakat.

Penelitian Yupita dan Juita (2020) menyatakan bahwa kelembagaan desa berdampak positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Lembaga desa merupakan elemen penting untuk menyelenggarakan pembangunan desa. Jika pembangunan desa tidak dilakukan, ditambah dengan partisipasi masyarakat yang minim maka penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di desa tidak akan berjalan dengan lancar sesuai rencana dan tujuan desa.

Penelitian Emylia dan Mildawati (2019) mendukung penelitian Yupita dan Juita (2020) menyimpulkan bahwa variabel kelembagaan desa dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Pengaruh kelembagaan desa terhadap kesejahteraan berdampak pada mudahnya

melaksanakan kegiatan dimana masyarakat ikut serta didalamnya untuk menyukseskan program pembangunan bagi masyarakat dalam rangka kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pemaparan diatas maka peneliti merumuskan hipotesis yang merupakan dugaan sementara sebagai berikut:

H₁ : Kelembagaan desa berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat

b. Pengaruh Transparansi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Pemendagri No. 113 Tahun. 2014 menjelaskan bahwa transparansi merupakan acuan dari suatu konsep keterbukaan informasi yang memberikan hak kepada masyarakat untuk mendapatkan dan mengetahui informasi keuangan yang dialokasikan kepada pemerintah desa. Keterbukaan informasi pengelolaan dana desa tersebut, nantinya akan dapat diawasi oleh orang-orang yang berkepentingan didalamnya termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat dengan tujuan agar pengelolaan dana desa dapat tercapai dengan baik, benar dan maksimal.

Kaitan Teori *Agency* jika dikaitkan dengan variabel transparansi yaitu prinsip keterbukaan dimana perinsip keterbukaan dari pemerintah desa yang bereperan sebagai *agent* memberikan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat. Kaitan Teori *Stewardship* jika dikaitkan dengan transparansi yaitu prinsip keterbukaan dimana pemerintah desa yang bereperan sebagai *stewards* memberikan hak kepada masyarakat sebagai *principal* untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya.

Penelitian Ardiyanti (2019) menunjukkan bahwa variabel transparansi berdampak positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian yang dilakukan Siregar (2021) mendukung hasil tersebut dimana variabel transparansi pengelolaan keuangan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

Berdasarkan pemaparan diatas maka peneliti merumuskan hipotesis yang merupakan dugaan sementara sebagai berikut:

H₂ : Transparansi berpengaruh Positif dan Sigmifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat

c. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Penelitian Emylia dan Mildawati (2019) menyatakan bahwa akuntabilitas penggunaan dana desa yang besar untuk sesuatu yang baik akan menghasilkan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintahan, adanya kepercayaan yang tinggi pada pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa dapat menghilangkan kecurigaan dan mengatasi masalah yang ada dalam administrasi keuangan dan mendukung pelaksanaan pemerintah menjadi lebih baik dengan harapan dapat memberikan rasa nyaman secara terbuka kepada pemerintah daerah setempat.

Kaitan Teori *Agency* jika dikaitkan dengan variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu dimana pemerintah desa yang berperan sebagai *agent* harus bertanggung jawabkan kepada masyarakat yang berperan sebagai *principal* mengenai proses pengelolaan dana desa sampai hasil dari peroses pengelolaan dana desa tersebut. Kaitan Teori *Stewardship* jika dikaitkan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu dimana pemerintah desa yang berperan seabagi *steward* wajib memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat desa yang

berperan sebagai *principal* mengenai proses pengelolaan dana desa sampai hasil dari peroses pengelolaan dana desa tersebut.

Hasil penelitian Ardiyanti (2019) menyimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian yang dilakukan Yupita dan Juita (2020) mendukung hasil penelitian yang didapat Ardiyanti (2019) dimana Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

Berdasarkan pemaparan diatas maka peneliti merumuskan hipotesis yang merupakan dugaan sementara sebagai berikut:

H₃ : Akuntabilitas Pengelolaan Dana desa berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat

d. Pengaruh Kelembagaan desa, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pada penelitian Hadi (2019) Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Genengan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, yang menunjukkan bahwa akuntabilitas yang baik dan benar kebijakan yang tegas serta peran aktif dari masyarakat secara simultan dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, hal ini dapat menjadi pendukung bagi peneliti dalam menentukan hipotesis.

Hasil penelitian Anwar (2020) mendukung hasil penelitian Hadi dimana pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa, kebijakan desa dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan secara simultan.

Berdasarkan pemaparan diatas maka peneliti merumuskan hipotesis yang merupakan dugaan sementara sebagai berikut:

H₄ : Kelembagaan desa, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana desa secara Simultan berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Pada Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kuantitatif *asosiatif*. Menurut Sugiyono (2019:17) Metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat *positivisme* dan digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, cara pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat statistik/kuantitatif, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah dipilih penulis dalam penelitian. Penelitian *asosiatif* adalah jenis penelitian yang memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh dari dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2019:65). Penelitian *asosiatif* pada penelitian ini digunakan untuk menjelaskan tentang pengaruh antara variabel Kelembagaan Desa, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Objek yang dipilih pada penelitian ini adalah Desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang.

3.1.2 Lokasi Penelitian

Riset yang dilakukan pada penelitian ini akan dilaksanakan pada Desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe yang beralamat di Jalan Printis Kemerdekaan Desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang.

3.1.3 Waktu Penelitian

Penelitian dan penulisan skripsi ini akan dilaksanakan mulai bulan Januari 2022 sampai selesai. Berikut tabel princiian waktu penelitian dan pelaksanaan penulisan skirpsi.

Tabel 3.1
Waktu Pelaksanaan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	2022								
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
1	Pengajuan Judul	■								
2	Penyusunan Proposal	■								
3	Bimbingan Proposal	■								
4	Seminar Proposal					■				
5	Pengumpulan Data						■			
6	Penyusunan dan Bimbingan Skripsi						■			
7	Seminar Hasil								■	
8	Sidang Meja Hijau									■

Sumber: Data diolah Peneliti, 2022

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Menurut Sugiyono (2019:194) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa penyebaran angket atau kuesioner kepada responden yang sudah ditentukan. Kemudian sumber data pada penelitian ini adalah masyarakat Desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2019:126) populasi merupakan wilayah yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai karakteristik tersendiri yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari/diteliti dan ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang yang sudah menyelesaikan pendidikan minimal tamatan SMA/SMK sederajat dan sudah berusia 18 tahun keatas. Jumlah masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan tersebut berjumlah 899 orang.

3.3.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2019:127) sampel adalah sebagian dari keseluruhan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dikarenakan populasi yang besar maka peneliti akan kesulitan dan membutuhkan waktu yang lama untuk mempelajari semua yang ada pada populasi. Dengan demikian peneliti dapat menggunakan sampel. Dalam menentukan jumlah suatu sampel dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rumus slovin dengan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Dimana:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi (899)

e = margin of error atau tingkat kesalahan yang ditetapkan 10% atau 0.1

Perhitungan sampel:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{899}{1 + 899 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{899}{1 + 899 (0,01)}$$

$$n = \frac{899}{1 + 8,99}$$

$$n = \frac{899}{9,99}$$

$n = 89,9$ dibulatkan menjadi 90.

Standar error yang digunakan pada perhitungan diatas sebesar 10%. Penentuan jumlah 10% tersebut digunakan peneliti dikarenakan peneliti sanggup menunjukkan data yang relavan sebanyak 90%. Hal yang menyebabkan peneliti melakukan penentuan standar error karena banyaknya jumlah populasi yang akan diteliti. Melihat hasil perhitungan diatas, maka didapatkan hasil sampel sebanyak 90 responden. Oleh karena itu, sampel dalam penelitian ini adalah 90 responden ($n=90$). Dikarenakan populasi dalam penelitian ini sangat banyak, waktu dan tenaga yang dimiliki juga terbatas tidak mungkin untuk mengambil data secara keseluruhan maka peneliti melakukan tindakan dengan mengambil sampel dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2019:133). Dimana kriteria yang dimaksud yaitu:

- Masyarakat yang sudah berumur 18 tahun ke atas.
- Masyarakat yang sudah menyelesaikan pendidikan minimal SMA/SMK sederajat.
- Masyarakat yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa penyebaran kuesioner atau angket. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2019:199). Teknik penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan kepada responden dan melampirkan beberapa pilihan jawaban yang telah ditetapkan.

3.5 Definisi Operasional Variabel

Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui pengaruh dari hubungan antara kelembagaan desa, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Pada latar belakang penelitian ini, variabel independennya (variabel bebas) ada tiga, yaitu kelembagaan desa, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Untuk variabel dependennya (variabel terikat), yaitu kesejahteraan masyarakat. Berikut operasional variabel dan pengukuran variabel dalam penelitian ini akan disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
Kelembagaan Desa (X1)	Kelembagaan desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa serta organisasi lokal desa (Siregar, 2021)	a. Kedudukan lembaga desa: b. Tugas dan fungsi. (Diadopsi dari UU No. 6 tahun 2014)	Ordinal
Transparansi (X2)	Transparansi adalah prinsip membuka diri kepada masyarakat untuk memberikan hak mereka mendapatkan akses informasi yang benar, jujur, dan tidak	a. Melibatkan masyarakat setiap dilakukan musyawarah. b. Akses informasi yang terbuka tentang perencanaan program.	Ordinal

	<p>diskriminatif mengenai penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara (Ardiyanti, 2019).</p>	<p>c. Akses informasi yang terbuka tentang pelaksanaan program. d. Akses informasi yang terbuka tentang pertanggung jawaban penggunaan dana desa (Diadopsi dari penelitian Ardiyanti, 2019)</p>	
<p>Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (X3)</p>	<p>Akuntabilitas adalah bentuk tanggung jawab yang harus diselesaikan dan menjunjung komitmen setiap orang atau kelompok untuk memenuhi tugas mereka dalam melayani individu, kelompok secara langsung atau dengan sesuatu yang bersangkutan (Siregar, 2021).</p>	<p>a. Tujuan tercapai. b. Pemerintah desa terlibat dalam mengelola dana desa. c. Tim pelaksanaan melakukan pengawasan. d. Pengelolaan dana desa memberikan laporan pertanggungjawaban (Diadopsi dari penelitian Ardiyanti, 2019).</p>	<p>Ordinal</p>
<p>Kesejahteraan Masyarakat (Y)</p>	<p>Kesejahteraan adalah usaha seseorang maupun organisasi agar dapat memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani dari seseorang maupun orang dalam organisasi tersebut dengan upaya meningkatkan produktivitas dirinya, baik dalam hubungan pekerjaan ataupun diluar pekerjaan yang secara langsung maupun tidak langsung dan memperoleh rasa aman, keselamatan, kesehatan dan kemakmuran bagi orang-orang tersebut (Siregar, 2021).</p>	<p>a. Kesehatan b. Pendidikan c. Pendapatan d. Perumahan (Diadopsi dari penelitian Wulandari, 2019)</p>	<p>Ordinal</p>

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

3.6 Skala Pengukuran Variabel

Skala pengukuran adalah keputusan yang dipakai sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga jika alat ukur tersebut digunakan maka akan menghasilkan data kuantitatif (Sugiyono, 2019:145). Pada skripsi ini peneliti menggunakan skala likert untuk melakukan pengukuran pada penelitian, Menurut Sugiyono (2019:146) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi individu atau kelompok dalam fenomena sosial yang terjadi. Untuk membantu responden dalam mengisi kuesioner, maka peneliti memberikan pilihan jawaban dengan menggunakan skala likert yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.3
Bobot Penilaian Kuesioner

No.	Pilihan jawaban	Skor
1	Sangat Setuju	5
2	Setuju	4
3	Netral	3
4	Tidak Setuju	2
5	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber : Ardiyanti,2019

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *software SPSS* versi 25. Analisis data terdiri dari statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis.

3.7.1 Uji Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2018:51) statistik deskriptif dipergunakan untuk suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan profil data sampel sebelum menggunakan teknik analisis statistik yang berfungsi untuk menguji hipotesis.

3.7.2 Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Menurut Ghozali (2018:51) uji validitas dilakukan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner dapat menjelaskan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner. Uji validitas dilakukan dengan melaksanakan Korelasi Item yang dilihat dari hasil perhitungan pada kolom *Corrected Item – Total Correlation*. Dalam uji ini, jika nilai r hitung lebih besar dari r tabel, maka hasil tersebut valid.

b. Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2018:45) uji reliabilitas adalah alat yang digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel (handal) jika jawaban responden terhadap pertanyaan stabil atau konsisten dari waktu ke waktu. Dengan demikian, uji reliabilitas ini digunakan sebagai alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Pengujian reliabilitas yang dilakukan dengan *Cronbach Alpha*. Secara umum, instrument penelitian dikatakan reliable jika memiliki koefisien *Cronbach Alpha* $> 0,60\%$. Jika nilai *Cronbach Alpha* yang didapat dari

masing-masing variabel $> 0,60\%$ maka variabel-variabel tersebut dinyatakan reliabel.

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018:161) uji normalitas merupakan uji yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah variabel dependen memiliki distribusi yang normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah regresi yang distribusi normal atau mendekati normal. Peneliti melakukan uji normalitas menggunakan uji *statistic one sample Kolmogorof-Smirnov*. Jika data terdistribusi dengan normal, maka normalitas suatu data dapat diketahui dengan melihat angka *differences* dan angka signifikansinya. Dimana dikatakan normal jika:

- a. Jika angka signifikannya $> 0,05$ maka model tersebut dikatakan telah terdistribusi dengan normal.
- b. Jika angka signifikannya $< 0,05$ maka model tersebut dikatakan tidak terdistribusi dengan normal.

b. Uji Multikolonieritas

Menurut Ghozali (2018:107) uji multikolonieritas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (variabel independen). Uji ini dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)* dimana:

- a. Jika $VIF < 10$ dan nilai *tolerance* $> 0,10$ maka dinyatakan bahwa tidak terjadi multikolonieritas.
- b. Jika $VIF > 10$ dan nilai *tolerance* $< 0,10$ maka dinyatakan bahwa terjadi multikolonieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2018:137) uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika dari Varian residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka dikatakan sebagai homoskedastisitas namun jika berbeda maka disebut sebagai heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini, pelaksanaan uji heteroskedastisitas dapat menggunakan uji *Scatter plot*. Dasar yang digunakan pada model ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.7.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Ghozali (2018) analisis regresi linear berganda adalah model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen (X). Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel Kelembagaan Desa (X₁), Transparansi (X₂) dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (X₃) terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y). Rumus untuk menghitung analisis regresi linear berganda, yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

Y = Kesejahteraan Masyarakat

α = Konstanta (nilai Y apabila X = 0)

β = Koefisien regresi (nilai peningkatan atau penurunan)

X_1 = Kelembagaan Desa

X_2 = Transparansi

X_3 = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

e = eror term (nilai-nilai dari variabel yang tidak dimasukkan ke dalam persamaan dan nilai ini biasanya diabaikan dalam perhitungan)

3.7.5. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji t)

Menurut Ghozali (2018) uji parsial (uji t) digunakan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Uji parsial (uji t) pada penelitian ini menggunakan 5% tingkat signifikansi atau 0,05. Dengan tingkat signifikansi 0,05 maka kriteria pengujian sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ dan $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, maka terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).
- b. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ dan $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

b. Uji Simultan (Uji F)

Menurut Ghozali (2018) uji simultan (uji F) digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan (bersamaan) mempengaruhi variabel dependen. Uji F pada penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5% atau 0,05 Dengan tingkat signifikansi 0,05 maka kriteria pengujian sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ dan f hitung $> f$ tabel, maka semua variabel independen (X) mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (Y).
- b. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ dan f hitung $< f$ tabel, maka semua variabel independen (X) tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (Y).
- c. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R^2)**

Menurut Ghozali (2018) uji koefisien determinasi (adjusted R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variasi variabel dependen, baik secara parsial atau simultan. Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol sampai ($0 < \text{adjusted } R^2 < 1$). Dimana:

- a. Jika nilai adjusted R^2 mendekati 0, maka kemampuan independen untuk menjelaskan variabel dependen sangat terbatas.
- b. Jika nilai adjusted R^2 mendekati 1, maka variabel independen mampu memberikan hampir semua informasi yang diperlukan untuk memperkirakan variabel dependen.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kelembagaan desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Semakin baik kelembagaan desa yang diterapkan maka akan semakin baik kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya kelembagaan desa akan memberikan pengawasan yang lebih ketat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dan membantu menerima aspirasi dari masyarakat sehingga dapat mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang.
2. Transparansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Semakin baik transparansi yang diterapkan maka akan semakin baik kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya transparansi maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan tersampaikan secara detail kepada masyarakat baik perencanaan, pengelolaan sampai hasilnya. Dengan menjalankan transparansi yang baik diharapkan dapat mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang.

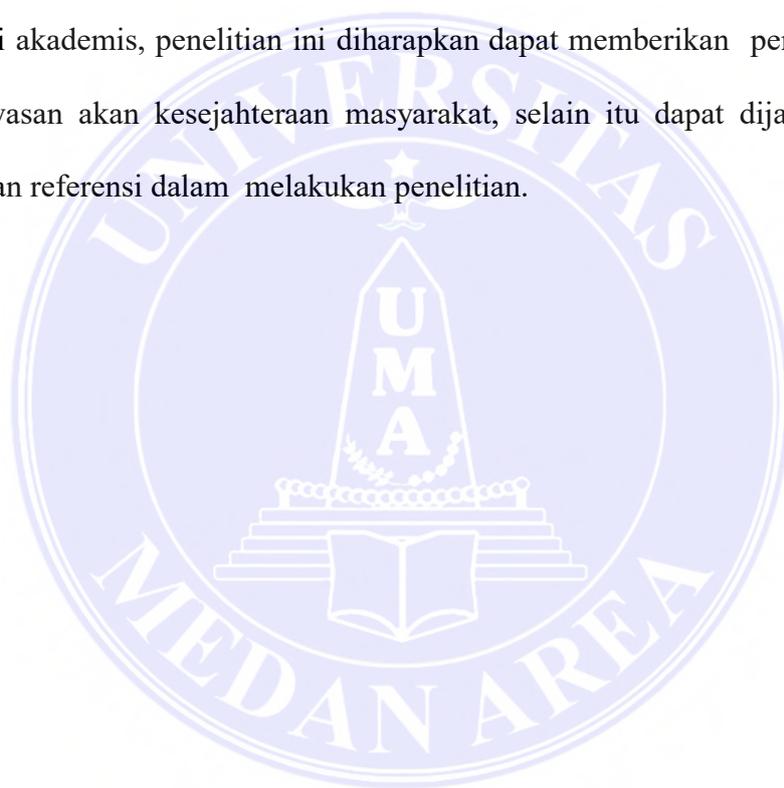
3. Akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Semakin baik akuntabilitas pengelolaan dana desa di terapkan maka akan semakin baik pula kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang baik maka masyarakat akan semakin mempercayai pemerintah desa dan kesejahteraan masyarakat di desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang dapat terwujud dan meningkat.
4. Kelembagaan desa, transparansi, akuntabilitas pengelolaan dana desa secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Semakin baik kelembagaan desa, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa diterapkan maka akan semakin baik pula kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pelaksanaan kelembagaan desa, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang baik maka masyarakat akan semakin mempercayai pemerintah desa dan kesejahteraan masyarakat di desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang dapat terwujud dan meningkat.

5.2 Saran

Saran yang dapat peneliti sampaikan dari hasil penelitian ini yaitu :

1. Bagi pemerintah desa diharapkan lebih giat lagi dalam menjalankan visi dan misi organisasi sehingga visi dan misi tercapai dengan maksimal. Selain itu diharapkan segera membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) agar pendapatan asli desa dapat meningkat juga dapat membuka lapangan pekerjaan terkhusus bagi putra dan putri daerah asli kelahiran Jati Kesuma sehingga membantu mendorong kesejahteraan masyarakat di desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang.

2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman dari kelembagaan desa, transparansi, akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe. Selain itu peneliti berharap peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat seperti alokasi dana desa, partisipasi masyarakat dan kebijakan desa.
3. Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman juga wawasan akan kesejahteraan masyarakat, selain itu dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian.



DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Kumala Faiza., Nur Diana, dan M. Cholid Mawardi. 2022. Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Kepemimpinan, Transparansi ADD, Dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi). *Jurnal Riset Akuntansi*. 11(03):99-108.
- Anwar, Muhammad Rizqi. 2020. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Pati Kabupaten Pati). Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah.
- Ardiyanti, Rika. 2019. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.
- Dewi, Filda Gean Rosiana Dan Sapari. 2020. Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi, Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 9(5):1-20.
- Donaldson, L., dan James H. Davis. 1991. Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns, *Australian Journal of Management*. 16(1):49-65.
- Dura, J. 2016. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa , Kebijakan Desa dan Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang). *Jurnal Ilmu Bisnis dan Ekonomi Asia*, 10(2):26-32.
- Emylia, Laura dan Titik Mildawati. 2019. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Kebijakan Desa, Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 8(6):1-8.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hadi, Rifa Rizka. 2019. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Genengan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang). Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.

<http://kumbang.desa.id>. Diakses pada tanggal 13 Maret 2022.

<https://databoks.katadata.co.id>. Diakses pada tanggal 11 Maret 2022.

<https://djpb.kemenkeu.go.id>. Diakses pada tanggal 8 Juni 2022.

<https://gramedia.com>. Diakses pada 23 Juli 2022.

<https://www.bps.go.id>. Diakses pada tanggal 8 Maret 2022.

Indriati, Nila. 2019. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga, 2018). Tesis Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Banyumas.

Kuswanti, Afida Putri Eka. 2020. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD), Kebijakan Desa, Dan Partisipasi Masyarakat (Studi Empiris Pada Desa Pasinan Lemah Putih Kecamatan Wiringinanom Kabupaten Gresik). Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Surabaya.

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik, Edisi Pertama*. Andy Offset, Yogyakarta.

Mayasari, Tri. 2019. Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung.

Nafidah, Lina Nasihatun., dan Mawar Suryaningtyas. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. 3(1):214-239.

Nasrul, Wedy. 2013. Peran Kelembagaan Lokal Adat Dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*. 14(1):102.

Prandara, R. 2020. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Finansial Masyarakat. Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung.

Putra, I Made Yoga Darma., dan Ni Ketut Rasmimi. 2019. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi*. 28(1):132-158.

Sengaji, I. 2018. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kebijakan Desa Terhadap Pembangunan Desa. Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Surabaya.

- Siregar, Dicky Arpillo. 2021. Pengaruh Akuntabilitas, Ttransparansi Pengelolaan Keuangan Desa, Kebijakan Desa Dan Kelembagaan Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai). Tesis Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Slyke, V. D. M. 2007. Agents or steward: Using theory to understand the government-nonprofit social service contracting relationship. *Journal of Public Administration Research and Theory*. 17(2):157-187.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Winardi, W. 2019. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Wulandari, S. 2019. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam. Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung.
- Yupita, Lasmi., dan Verni Juita. 2020. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam). *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*.11(1):56-64.



Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

Dalam rangka penyusunan tugas akhir (skripsi) sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, maka dengan ini saya memohon dengan hormat kesediaan dan bantuan dari Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk dapat mengisi kuesioner penelitian saya yang berjudul **“Pengaruh Kelembagaan desa Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang”**. Atas Ketersediaan dan bantuan yang diberikan dari Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk mengisi kuesioner ini saya ucapkan terimakasih banyak.

Identitas Responden

Nama :

Jenis Kelamin :

Umur :

Pendidikan : a. SMA/SMK Sederajat

b. Diploma 3 (D3)

c. Sarjana (S1)

d. Pascasarjana (S2)

e. Lainnya :.....

Petunjuk Pengisian

1. Berikan tanda centang (√) pada kolom yang dipilih sesuai dengan pilihan Bapak/Ibu/Saudara/i.
2. Tidak ada pernyataan benar atau salah, tetapi setuju atau tidak setuju dengan pernyataan tersebut.
3. Setelah mengisi kuesioner ini mohon Bapak/Ibu/Saudara/i dapat memberikan kembali kepada yang menyerahkan kuesioner ini.
4. Terdapat lima pilihan jawaban yang tersedia untuk masing-masing pernyataan, yaitu:
 - a. SS : Sangat Setuju
 - b. S : Setuju
 - c. N : Netral
 - d. TS : Tidak Setuju
 - e. STS : Sangat Tidak Setuju

Pernyataan untuk Variabel Kesejahteraan Masyarakat

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
		5	4	3	2	1
1.	Saat ini anda mudah mendapatkan fasilitas kesehatan dari pemerintah.					
2.	Pendidikan anda saat ini mendukung anda untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik					
3.	Biaya hidup yang anda keluarkan saat ini sebanding dengan pendapatan anda saat ini					
4.	Infrastruktur di tempat anda tinggal sudah memadai.					

(Siregar, 2021)

Pernyataan untuk Variabel Kelembagaan Desa

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
		5	4	3	2	1
1.	Saya merasa peran kelembagaan desa dalam mensejahterakan masyarakat besar pengaruhnya.					
2.	Dengan adanya BumDes membuka akses peluang ekonomi bagi masyarakat.					
3.	Kelembagaan desa menampung aspirasi dari masyarakat.					
4.	Kelembagaan desa aktif menggali potensi dan masalah yang ada di desa.					

(Siregar, 2021)

Pernyataan untuk Variabel Transparansi

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
		5	4	3	2	1
1.	Saya merasa masyarakat selalu diikut sertakan dalam musyawarah rencana pengalokasian dana desa.					
2.	Masyarakat mempunyai akses yang cukup dalam informasi rencana penggunaan dana desa.					
3.	Tersedia akses yang mudah untuk memperoleh dokumen publik untuk dana desa.					
4.	Pengelola dana desa terbuka mengenai seluruh informasi pengelolaan dana desa kepada seluruh masyarakat.					

(Siregar, 2021)

Pernyataan untuk Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

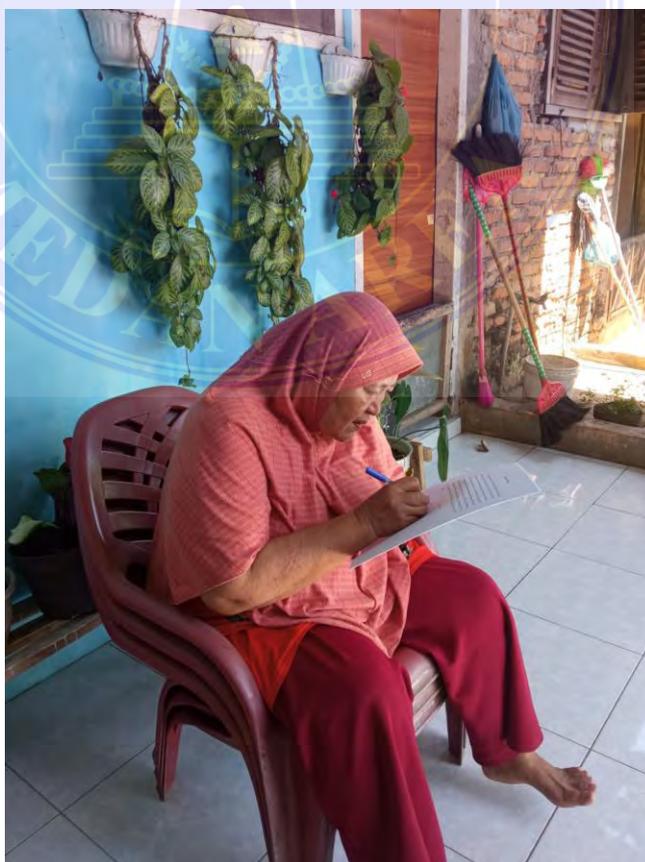
No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
		5	4	3	2	1
1.	Tahapan pengelolaan dana desa melibatkan seluruh unsur masyarakat.					
2.	Kepentingan publik dan golongan menjadi pertimbangan dan perhatian utama dalam pengalokasian dana desa.					
3.	Masyarakat dapat mudah mengakses dan mendapatkan rincian laporan pertanggung jawaban penggunaan dana desa secara cepat dan tepat.					

4.	Saya merasa pengelolaan dana desa telah diawasi dengan baik oleh tim pelaksana.					
----	---	--	--	--	--	--

(Siregar, 2021)

LAMPIRAN 2 Dokumentasi







LAMPIRAN 3 Jawaban Responden Untuk Keempat Variabel

No	Kelembagaan Desa (X1)				Transparansi (X2)				Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (X2)				Kesejahteraan Masyarakat (Y)			
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	Y1	Y2	Y3	Y4
1	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5
2	4	4	5	4	4	4	4	5	5	4	4	5	4	5	4	4
3	5	4	5	4	5	4	4	5	5	4	4	4	5	4	4	5
4	4	5	4	4	4	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5
5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	4	5	5	4	4	5	5
6	4	4	5	4	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	4	5
7	4	5	4	5	4	5	5	4	4	4	5	4	5	4	4	4
8	5	4	5	4	5	4	4	5	5	4	4	5	4	5	5	4
9	5	4	4	5	5	4	5	4	4	5	5	4	4	5	4	4
10	5	5	4	4	5	5	4	5	4	5	4	5	5	4	4	5
11	4	5	4	4	4	5	5	4	4	4	5	4	5	4	5	4
12	5	4	4	5	5	4	5	4	5	4	5	4	4	5	4	4
13	5	5	5	4	5	5	4	5	4	5	4	4	5	4	5	4
14	5	4	4	5	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	4	4
15	4	5	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4
16	5	4	4	5	5	4	5	4	4	4	5	4	4	5	4	4
17	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5
18	5	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4
19	4	5	5	4	4	5	4	5	5	5	4	4	5	4	5	4
20	5	4	4	5	5	4	5	5	4	5	5	5	4	4	4	5
21	4	3	4	3	4	5	5	4	5	4	5	4	4	5	5	4
22	4	5	4	5	4	5	5	5	5	4	4	5	4	5	4	4
23	5	5	4	4	5	5	5	5	4	5	4	4	5	4	4	5
24	4	3	4	3	4	5	5	4	4	4	5	5	4	5	4	5
25	3	4	3	4	4	5	4	5	5	4	4	5	4	4	5	4
26	4	4	5	4	4	4	5	5	5	4	5	4	5	4	4	5
27	5	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	5	5	4	4	4
28	4	5	4	5	4	5	4	4	4	4	4	5	5	4	5	4
29	5	4	4	4	5	4	5	4	4	4	5	5	4	5	4	4
30	4	4	5	5	4	4	5	5	4	5	3	5	5	4	4	5
31	5	5	4	4	5	5	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4
32	3	4	4	4	3	4	5	4	4	4	3	4	3	4	3	4
33	4	3	4	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
34	5	4	5	4	5	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	5
35	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4
36	5	3	5	5	5	4	5	5	4	4	5	4	4	5	5	4
37	5	4	3	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	5	5	4

38	4	4	5	5	4	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	5
39	5	5	4	4	5	5	5	4	5	4	5	4	5	4	5	5
40	4	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	4	4	5	5	4
41	4	5	4	5	4	5	4	4	5	5	4	5	5	4	4	5
42	5	5	4	5	5	5	4	4	5	4	4	5	4	5	4	5
43	4	4	4	5	4	4	5	4	5	4	5	5	4	4	5	4
44	4	4	5	4	4	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	4
45	5	5	4	4	5	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4	5
46	5	4	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4
47	3	4	4	4	3	4	5	4	4	3	3	4	3	4	4	3
48	4	4	5	4	4	4	4	5	4	5	4	5	4	5	5	4
49	5	4	5	4	5	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	5
50	5	5	5	4	5	5	4	5	5	4	4	5	5	4	5	5
51	4	5	4	5	4	5	4	4	4	5	4	4	4	5	4	5
52	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4
53	5	4	4	4	5	4	5	4	4	5	5	4	5	4	4	5
54	5	4	5	4	5	4	5	5	5	4	5	4	5	4	4	5
55	4	5	4	4	4	5	5	4	5	4	5	5	4	5	5	4
56	5	4	5	4	5	4	5	5	4	5	5	4	4	5	5	4
57	5	4	4	5	5	4	4	4	4	5	4	5	4	4	5	5
58	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	5	5	4	4	4
59	5	4	5	5	5	4	4	5	4	4	4	5	5	4	4	5
60	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4
61	5	4	5	4	5	4	5	5	4	5	5	4	4	5	5	4
62	4	4	5	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	5	4
63	4	5	4	5	4	5	5	4	4	5	5	4	4	4	5	5
64	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4
65	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4	5	4	4	5	5	4
66	4	4	5	4	4	4	5	5	4	4	5	4	4	4	5	4
67	4	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5
68	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4
69	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3
70	4	4	4	5	4	4	5	4	4	5	5	4	5	4	5	4
71	4	4	5	5	4	4	4	5	4	5	4	5	5	4	4	5
72	5	4	4	4	5	4	5	4	5	4	5	4	4	4	4	5
73	4	4	5	4	4	4	5	5	4	4	5	4	5	3	5	3
74	4	5	4	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4
75	5	4	4	4	5	4	5	4	4	4	5	4	5	4	4	4
76	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	3
77	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	4
78	4	4	5	5	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	5	5

79	5	4	5	4	5	4	4	5	5	4	4	5	4	5	4	4
80	4	4	4	5	4	4	5	4	5	5	5	4	4	5	5	4
81	4	5	4	5	4	5	5	4	4	4	5	4	4	5	4	4
82	5	5	5	4	5	5	4	5	4	5	4	4	4	4	5	5
83	4	5	4	5	4	5	4	4	5	5	4	4	3	4	4	4
84	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4
85	5	4	4	5	5	4	5	4	5	4	5	4	5	5	4	5
86	5	5	4	5	5	5	4	4	5	5	4	5	4	5	5	4
87	4	4	4	5	4	4	5	4	5	4	5	4	3	4	3	4
88	5	5	5	4	5	5	4	5	4	5	4	4	5	4	5	4
89	5	4	5	4	5	4	5	5	4	5	5	5	5	4	4	5
90	4	4	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	4	4

Lampiran 4 Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics							
	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
Kelembgaan Desa	90	5	14	19	17.58	1.101	1.213
Transparansi	90	5	15	20	17.81	1.027	1.054
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	90	5	14	19	17.67	.912	.831
Kesejahteraan Masyarakat	90	5	14	19	17.42	1.101	1.213
Valid N (listwise)	90						

Lampiran 5 Uji Kualitas Data
UJI VALIDITAS DATA VARIABEL Y

Correlations

		Y1	Y2	Y3	Y4	Total_Y
Y1	Pearson Correlation	1	-.267*	.069	.354**	.600**
	Sig. (2-tailed)		.011	.521	.001	.000
	N	90	90	90	90	90
Y2	Pearson Correlation	-.267*	1	-.027	-.133	.280**
	Sig. (2-tailed)	.011		.798	.211	.008
	N	90	90	90	90	90
Y3	Pearson Correlation	.069	-.027	1	-.048	.494**
	Sig. (2-tailed)	.521	.798		.651	.000
	N	90	90	90	90	90
Y4	Pearson Correlation	.354**	-.133	-.048	1	.599**
	Sig. (2-tailed)	.001	.211	.651		.000
	N	90	90	90	90	90
Total_Y	Pearson Correlation	.600**	.280**	.494**	.599**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.008	.000	.000	
	N	90	90	90	90	90

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

UJI VALIDITAS DATA VARIABEL X1

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	Total_X1
X1.1	Pearson Correlation	1	.015	.155	-.012	.605**
	Sig. (2-tailed)		.888	.144	.912	.000
	N	90	90	90	90	90
X1.2	Pearson Correlation	.015	1	-.074	.078	.517**
	Sig. (2-tailed)	.888		.487	.463	.000
	N	90	90	90	90	90
X1.3	Pearson Correlation	.155	-.074	1	-.199	.429**
	Sig. (2-tailed)	.144	.487		.060	.000
	N	90	90	90	90	90
X1.4	Pearson Correlation	-.012	.078	-.199	1	.430**
	Sig. (2-tailed)	.912	.463	.060		.000
	N	90	90	90	90	90
Total_X1	Pearson Correlation	.605**	.517**	.429**	.430**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	90	90	90	90	90

UJI VALIDITAS DATA VARIABEL X2

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	Total_X2
X2.1	Pearson Correlation	1	-.061	-.040	.154	.574**
	Sig. (2-tailed)		.571	.710	.146	.000
	N	90	90	90	90	90
X2.2	Pearson Correlation	-.061	1	.022	-.075	.440**
	Sig. (2-tailed)	.571		.838	.481	.000
	N	90	90	90	90	90
X2.3	Pearson Correlation	-.040	.022	1	-.067	.446**
	Sig. (2-tailed)	.710	.838		.532	.000
	N	90	90	90	90	90
X2.4	Pearson Correlation	.154	-.075	-.067	1	.504**
	Sig. (2-tailed)	.146	.481	.532		.000
	N	90	90	90	90	90
Total_X2	Pearson Correlation	.574**	.440**	.446**	.504**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	90	90	90	90	90

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

UJI VALIDITAS DATA VARIABEL X3

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	Total_X3
X3.1	Pearson Correlation	1	-.327**	.039	.209*	.528**
	Sig. (2-tailed)		.002	.717	.048	.000
	N	90	90	90	90	90
X3.2	Pearson Correlation	-.327**	1	-.047	-.135	.277**
	Sig. (2-tailed)	.002		.662	.206	.008
	N	90	90	90	90	90
X3.3	Pearson Correlation	.039	-.047	1	-.251*	.465**
	Sig. (2-tailed)	.717	.662		.017	.000
	N	90	90	90	90	90
X3.4	Pearson Correlation	.209*	-.135	-.251*	1	.455**
	Sig. (2-tailed)	.048	.206	.017		.000
	N	90	90	90	90	90
Total_X3	Pearson Correlation	.528**	.277**	.465**	.455**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.008	.000	.000	
	N	90	90	90	90	

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

UJI RELIABILITAS VARIABEL Y

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha ^a	N of Items
.710	4
<p>a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates reliability model assumptions. You may want to check item codings.</p>	

UJI RELIABILITAS VARIABEL X1

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha ^a	N of Items
.646	4
a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates reliability model assumptions. You may want to check item codings.	

UJI RELIABILITAS VARIABEL X2

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha ^a	N of Items
.618	4
a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates reliability model assumptions. You may want to check item codings.	

UJI RELIABILITAS VARIABEL X3

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha ^a	N of Items
.740	4
a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates reliability model assumptions. You may want to check item codings.	

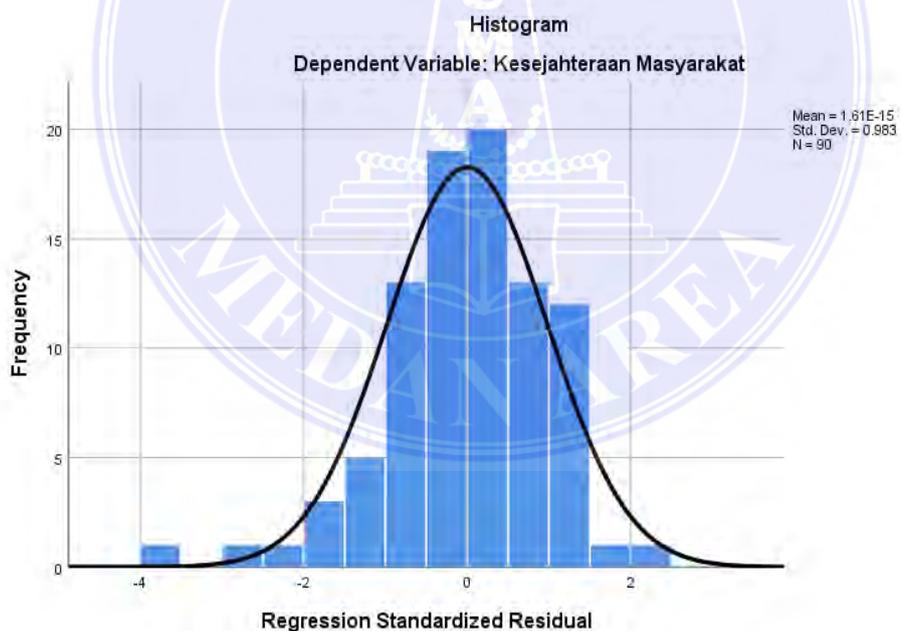
Lampiran 6 Uji Asumsi Klasik

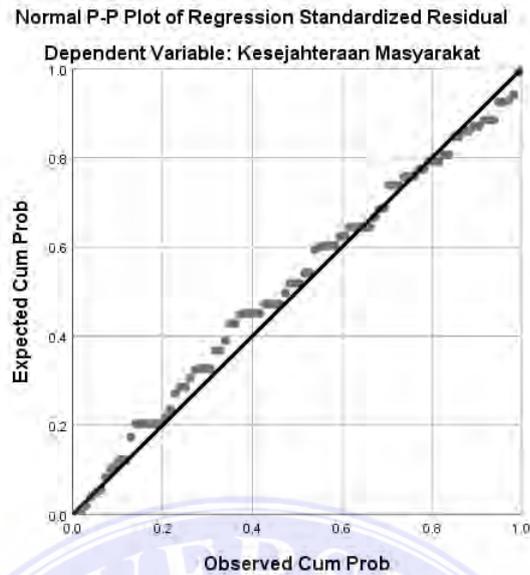
UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		90
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.81718106
Most Extreme Differences	Absolute	.082
	Positive	.056
	Negative	-.082
Test Statistic		.082
Asymp. Sig. (2-tailed)		.178 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.





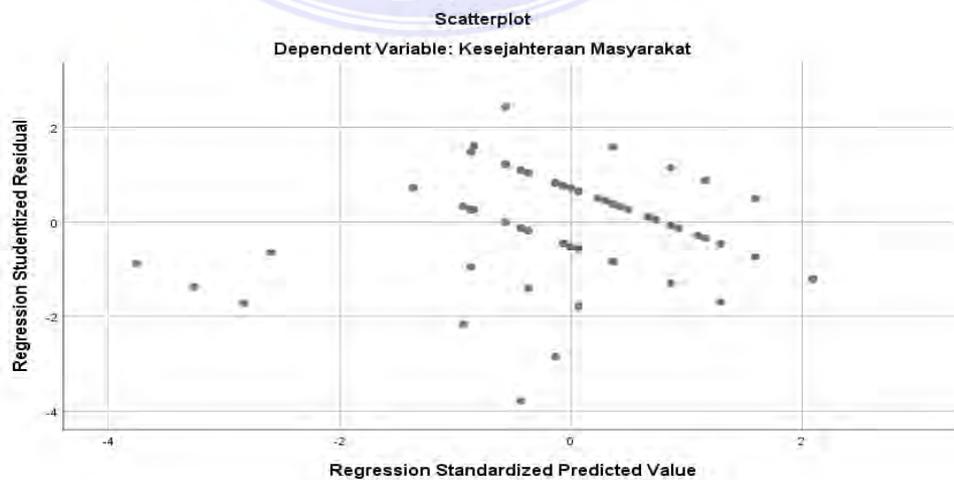
UJI MULTIKOLINEARITAS

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.343	1.961		.685	.495		
	Kelembgaan Desa	.222	.097	.222	2.290	.024	.682	1.465
	Transparansi	.368	.109	.343	3.378	.001	.622	1.607
	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	.319	.111	.264	2.865	.005	.754	1.326

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat

UJI HETEROSKEDASTISITAS



Lampiran 7 Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.343	1.961		.685	.495		
	Kelembgaan Desa	.222	.097	.222	2.290	.024	.682	1.465
	Transparansi	.368	.109	.343	3.378	.001	.622	1.607
	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	.319	.111	.264	2.865	.005	.754	1.326

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat

Lampiran 8 Uji Hipotesis

UJI PARSIAL (UJI t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.343	1.961		.685	.495		
	Kelembgaan Desa	.222	.097	.222	2.290	.024	.682	1.465
	Transparansi	.368	.109	.343	3.378	.001	.622	1.607
	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	.319	.111	.264	2.865	.005	.754	1.326

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat

UJI SIMULTAN (UJI F)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	48.523	3	16.174	23.404	.000 ^b
	Residual	59.433	86	.691		
	Total	107.956	89			

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat

b. Predictors: (Constant), Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Kelembgaan Desa, Transparansi

UJI KOEFISIEN DETERMINASI (ADJUSTED R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.770 ^a	.649	.630	1.005

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Kelembgaan Desa, Transparansi

b. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat



Lampiran 9 Surat izin Penelitian



UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus 1 : Jl. Negeri No. 1 Medan Estate Telp (061) 7366076, 7366146, 7366148, 7366151, Fax (061) 7366098
Kampus 2 : Jl. Sei Gering No. 701, Sei Gering No. 702 Medan Telp (061) 8225462, 8221994, Fax (061) 8226711
Email : um@medanarea.ac.id Website : www.medanarea.ac.id www.um.ac.id um@medanarea.ac.id

Nomor : 1640/TEB/011/V/2022
Lamp :
Perihal : Izin Research / Survey

24 Mei 2022

Kepada Yth,
Desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area di Medan, mengharapakan bantuan saudara kepada mahasiswa kami :

Nama : M. FIKRI ASSIDDIQ
N P M : 188330035
Program Studi : Akuntansi
Judul : Pengaruh Kelembagaan Desa, Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang

Untuk diberi izin Research / Survey yang Saudara pimpin selama Satu Bulan. Hal ini dibutuhkan sehubungan dengan tugasnya menyusun Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Perguruan Tinggi dengan memenuhi ketentuan dan peraturan administrasi di Instansi / Perusahaan Bapak/Ibu.

Dapat kami beritahukan bahwa Research ini dipergunakan hanya untuk kepentingan ilmiah semata-mata. Kami mohon kiranya diberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan, serta memberikan surat keterangan yang menyatakan telah selesai melakukan penelitian.

Demikian kami sampaikan atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wakil Dekan Bidang
Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni

Dr. Wan Suryani, SE, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Kepala LPPM
3. Mahasiswa ybs
4. Pertinggal

Lampiran Surat Selesai Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
KECAMATAN NAMORAMBE
DESA JATI KESUMA

Jl. Perintis Kemerdekaan Desa Jati Kesuma Kode Pos 20356
Telepon Faks
E-mail : jatikesima@gmail.com Website : www.desajatikesima-namorambe.id

Jati Kesuma, 22 Juli 2022

Nomor : 423 / 458
Sifat : Biasa
Lamp- :
Perihal : Pelaksanaan Research /Survey

Kepada Yth,
Dekan Universitas Medan Area (UMA)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Di -
Tempat

Dengan Hormat

Menindaklanjuti Surat Wakil Dekan Universitas Medan Area Fakultas Ekonomi dan Bisnis Nomor 1640/FEB/01.1/v/2022 tanggal 24 Mei 2022 perihal Research / Survey

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, bersama dengan surat ini kami sampaikan bahwa nama yang tertera dibawah ini, yaitu ;

Nama : M.FIKRI ASSIDDIQ
NPM : 188330035
Judul Penelitian : " Pengaruh Kelembagaan Desa, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe Kab.Deli Serdang"

Telah selesai melaksanakan Kegiatan Research /Survey di Desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan 24 Juni 2022

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat Dipergunakan sebagaimana mestinya.

